

BUMDES SAWIT MANDIRI: INOVASI KELEMBAGAAN DESA DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN BERKELANJUTAN

Lina Warniati

Interdisciplinary Islamic Studies, Konsentrasi Pekerjaan Sosial, UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, Kota Yogyakarta Indonesia
23200012065@student.uin-suka.ac.id

Abstract

This study examines the role of BUMDes Sawit Mandiri in Cibubukan Village, Aceh Singkil, as a concrete effort to promote community empowerment and economic independence at the village level. Emerging from a context of stagnant socio-economic conditions, low village revenue, and underutilized assets, BUMDes was established to manage local potential—particularly palm oil plantations in a professional, participatory, and sustainable manner. Employing a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews, direct observations, and document analysis. The findings reveal that community participation is a key determinant of BUMDes' success, although challenges persist due to limited information access, residents' work constraints, and insufficient communication between local government and the community. The study also highlights that the success of BUMDes is not solely measured by its economic outcomes but also by its ability to foster collective awareness, strengthen accountability, and reinforce local social structures. Therefore, BUMDes Sawit Mandiri functions not only as a village business unit but also as a transformative social institution with the potential to achieve local economic sovereignty when managed under the principles of participation, transparency, and community empowerment.

Keywords: BUMDes, community empowerment, participation, village economy, palm oil.

Abstrak

Penelitian ini membahas peran BUMDes Sawit Mandiri di Desa Cibubukan, Aceh Singkil, sebagai upaya nyata dalam mendorong kemandirian dan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Lahir dari kondisi sosial ekonomi yang stagnan, rendahnya pendapatan asli desa, serta pengelolaan aset yang belum optimal, BUMDes hadir untuk mengelola potensi lokal khususnya perkebunan kelapa sawit secara profesional, partisipatif, dan berkelanjutan. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci dalam keberhasilan BUMDes, meskipun dalam praktiknya masih menghadapi tantangan berupa rendahnya tingkat keterlibatan warga akibat keterbatasan informasi, kesibukan pekerjaan, serta minimnya komunikasi dua arah antara pemerintah desa dan masyarakat. Analisis juga menemukan bahwa keberhasilan BUMDes tidak hanya ditentukan oleh aspek ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan lembaga ini dalam membangun kesadaran kolektif, meningkatkan akuntabilitas, serta memperkuat struktur sosial desa. Dengan demikian, BUMDes Sawit Mandiri tidak sekadar berfungsi sebagai unit usaha desa, melainkan juga sebagai instrumen transformasi sosial yang berpotensi mewujudkan kedaulatan ekonomi lokal jika dikelola berdasarkan prinsip partisipasi, transparansi, dan pemberdayaan komunitas.

Kata Kunci: BUMDes, pemberdayaan masyarakat, partisipasi, ekonomi desa, kelapa sawit.

PENDAHULUAN

Desa Cibubukan merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, terutama komoditas kelapa sawit. Namun, potensi tersebut dalam waktu yang cukup lama belum mampu dikelola secara optimal untuk mendorong kemandirian serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Kondisi ini semakin diperburuk oleh rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, yang dipengaruhi oleh keterbatasan informasi, kesibukan pekerjaan sehari-hari, serta anggapan bahwa program-program desa hanya bersifat formalitas atau sekadar proyek pemerintah (Rahman 2023).

Sebagian besar masyarakat Cibubukan bermata pencaharian sebagai pedagang dan petani, sehingga keterlibatan mereka dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan desa cenderung terbatas. Minimnya sosialisasi serta lemahnya komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat juga menambah rendahnya pemahaman warga terhadap urgensi keberadaan BUMDes sebagai instrumen penting dalam pemberdayaan ekonomi lokal.

Situasi sosial ekonomi desa yang stagnan, rendahnya pendapatan asli desa (PAD), serta belum maksimalnya pengelolaan aset desa menjadi tantangan utama bagi pemerintah maupun masyarakat. Padahal, lahan-lahan desa yang sangat potensial untuk budidaya kelapa sawit masih banyak dibiarkan sebagai lahan tidur tanpa memberi manfaat nyata bagi masyarakat (Marini et al. 2023). Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah desa bersama tokoh masyarakat serta sejumlah perusahaan mitra, seperti PT Nafasindo dan PT Socfindo, berinisiatif membentuk sebuah lembaga ekonomi desa yang dapat mengelola potensi tersebut secara profesional, partisipatif, dan berkelanjutan. Dari inisiatif inilah kemudian lahir BUMDes Sawit Mandiri sebagai langkah konkret dalam menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi desa.

BUMDes Sawit Mandiri tidak hanya dirancang sebagai sarana pengelolaan kebun kelapa sawit milik desa, tetapi juga berfungsi sebagai motor penggerak kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan warga, serta penyediaan layanan kebutuhan dasar seperti air bersih (Hutagaol 2024). Dengan prinsip partisipatif dan pengelolaan yang transparan, BUMDes ini diharapkan menjadi fondasi kokoh bagi terwujudnya kemandirian ekonomi Desa Cibubukan (Lega and Wahid 2022).

Kelembagaan BUMDes di Indonesia sendiri telah lama diperkenalkan oleh pemerintah sebagai strategi untuk memperkuat institusi sosial ekonomi desa. Hal ini diawali dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberi mandat kepada desa-desa untuk mendirikan badan usaha milik desa, kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDes. Perkembangan berikutnya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan legitimasi lebih kuat kepada BUMDes sebagai badan hukum yang berwenang mengelola aset desa dan potensi sosial ekonomi (Irdyanti, Nursamsir, and Baso 2024). Regulasi ini diperjelas melalui Permendesa PD TT Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian,

pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran BUMDes. Secara ideal, regulasi tersebut diharapkan mampu mempercepat penguatan ekonomi desa. Namun, dalam praktiknya, perjalanan panjang kehadiran BUMDes di Indonesia justru kerap menimbulkan keraguan, baik dari masyarakat desa maupun aparat pemerintah sendiri, mengenai kapasitas BUMDes untuk benar-benar menjadi ikon penguatan ekonomi lokal (Marumu, Hilmi, and Satrina. 2021).

Sejumlah kajian yang dilakukan oleh akademisi maupun pemerhati desa menunjukkan bahwa BUMDes kerap dipersepsikan hanya sebagai proyek pemerintah semata, sehingga legitimasi dan daya lekatnya di tengah masyarakat masih lemah. Namun, tidak semua BUMDes gagal; ada pula yang berhasil memberi dampak nyata bagi peningkatan ekonomi desa (Moh. Subhan 2020). Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh kecepatan transformasi BUMDes dari sekadar “proyek pemerintah” menjadi milik masyarakat, yang banyak didukung oleh kepemimpinan kepala desa yang progresif serta mendorong prakarsa warga.

Sebagai wadah untuk memperkuat ekonomi desa, BUMDes tentu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, partisipasi masyarakat menjadi aspek yang sangat diharapkan dalam setiap pelaksanaan program BUMDes. Dengan adanya badan pengawas yang melibatkan masyarakat maupun anggota BPD, proses pengawasan dapat lebih terbuka dan akuntabel. Keberhasilan program BUMDes juga menuntut adanya kesadaran kolektif, partisipasi aktif masyarakat, serta kebijakan pemerintah desa yang bijaksana untuk mengarahkan dan membimbing warga agar turut serta dalam setiap kegiatan BUMDes.

Partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam mencapai tujuan BUMDes Cibubukan. Keberhasilan pelaksanaan program tidak hanya bergantung pada aparat pemerintah desa maupun pengurus BUMDes, melainkan juga pada kesediaan warga untuk berpartisipasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, hingga evaluasi. Partisipasi ini sangat penting untuk menutupi keterbatasan anggaran dan sumber daya pemerintah desa (Rahman 2023). Namun, dalam kenyataannya, tidak semua warga terlibat aktif. Berbagai faktor memengaruhi, seperti minimnya sosialisasi, kesibukan kerja karena mayoritas penduduk berprofesi sebagai pedagang dan petani hingga pandangan sebagian ibu rumah tangga yang merasa kurang mendapatkan manfaat langsung dari keterlibatan mereka. Untuk itu, diperlukan strategi komunikasi yang efektif dari pemerintah desa dan pengurus BUMDes agar masyarakat semakin menyadari pentingnya partisipasi mereka.

Pembangunan desa yang berkelanjutan hanya dapat terwujud dengan partisipasi aktif masyarakat serta pengelolaan potensi lokal yang baik. BUMDes hadir sebagai instrumen strategis untuk mencapai kemandirian ekonomi desa (Marumu, Hilmi, and Satrina. 2021). Dalam konteks Desa Cibubukan, BUMDes Sawit Mandiri menjadi contoh nyata bagaimana inisiatif lokal mampu menciptakan perubahan signifikan melalui pengelolaan potensi kelapa sawit secara profesional dan berkelanjutan. Mengingat kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan yang bernilai ekonomi tinggi dan menjadi sumber penghidupan utama masyarakat pedesaan, maka pengembangan program

pemberdayaan berbasis sawit tidak hanya sebatas pada produksi, tetapi juga harus meliputi pengelolaan, pengolahan, serta pemasaran yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat dalam BUMDes kelapa sawit mencerminkan keterlibatan mereka sejak tahap identifikasi potensi hingga evaluasi program. Masyarakat seharusnya tidak diposisikan hanya sebagai objek, tetapi sebagai subjek yang berperan langsung dalam menentukan arah pembangunan desa (Nurdayati dkk 2021). Partisipasi masyarakat dapat berupa sumbangan tenaga, ide, pikiran, maupun sumber daya lain, yang menunjukkan adanya kesadaran kolektif untuk membangun kemandirian ekonomi desa. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan BUMDes sangat bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat. Partisipasi sebagai bentuk pemberdayaan, di mana masyarakat berperan dalam penyusunan rencana dan implementasi program pembangunan.

Program BUMDes mencakup kejelasan tanggung jawab, lokasi, dan waktu kegiatan, serta harus dilandasi oleh tujuan, kebijakan, prosedur, dan anggaran yang jelas. Dalam konteks Desa Cibubukan, pelaksanaan program BUMDes Sawit Mandiri meliputi pengelolaan unit usaha sawit, keterlibatan petani lokal, pemanfaatan aset desa, dan pengembangan mekanisme operasional yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Secara hukum, BUMDes didefinisikan dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu sebagai badan usaha yang modalnya berasal dari desa melalui penyertaan kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa, dan usaha lain demi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes dapat menjalankan usaha ekonomi maupun pelayanan publik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, BUMDes diharapkan mampu menjadi alternatif strategis dalam penguatan ekonomi desa (Irdyanti, Nursamsir, and Baso 2024). Sebagaimana ditegaskan oleh Affandy, tujuan pembentukan BUMDes mencakup: meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, mengoptimalkan pemanfaatan potensi sesuai kebutuhan masyarakat, dan menjadi tulang punggung pertumbuhan serta pemerataan ekonomi pedesaan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (Baba 2017) yang diarahkan untuk memahami secara mendalam dinamika pengelolaan BUMDes Sawit Mandiri di Desa Cibubukan, Aceh Singkil. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan perangkat desa, pengurus BUMDes, tokoh masyarakat, dan perwakilan perusahaan mitra, disertai observasi langsung terhadap tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Untuk memperkaya temuan, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder berupa dokumen resmi desa, laporan kegiatan, serta notulen rapat. Analisis data mengikuti kerangka model interaktif Miles dan Huberman (Garcia et al., n.d.), yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara sistematis. Guna menjamin validitas,

digunakan teknik triangulasi sumber dan metode, serta dilakukan konfirmasi hasil temuan kepada informan kunci (*member check*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembentukan BUMDes Sawit Mandiri di Desa Cibubukan merupakan respons terhadap stagnasi ekonomi desa, ketimpangan dalam pemanfaatan potensi lokal, serta lemahnya struktur kelembagaan dan partisipasi masyarakat. Desa yang secara geografis dan agronomis memiliki keunggulan dalam komoditas kelapa sawit ternyata belum mampu mengelola potensi tersebut secara adil dan berkelanjutan. Ketiadaan sistem kelembagaan yang partisipatif dan akuntabel, serta dominasi aktor eksternal dalam proses pembangunan, mencerminkan adanya ketidakseimbangan kekuasaan dalam praktik pembangunan desa.

Jika ditinjau dari perspektif pemberdayaan komunitas menurut Jim Ife (Kurnia Dina, Syukur, and Makleat 2023), pendekatan pembangunan desa idealnya tidak boleh bersifat top-down dan berorientasi pada hasil semata, melainkan harus menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif yang mampu mengontrol, mengarahkan, dan menentukan nasib kolektifnya sendiri. Dalam pendekatan pemberdayaan Jim Ife, pembangunan harus berakar dari lokalitas, berlandaskan keadilan sosial, inklusif, dan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan serta keberlanjutan ekologis.

Rekomendasi Kebijakan: Implikasi Teori Pemberdayaan Komunitas Jim Ife pada BUMDes Sawit Mandiri Desa Cibubukan

1. Reorientasi Peran BUMDes dari Lembaga Ekonomi Menjadi Lembaga Sosial Transformatif
Sesuai dengan prinsip pemberdayaan menurut Jim Ife, pembangunan tidak cukup berorientasi pada hasil ekonomi semata. Oleh karena itu, BUMDes Sawit Mandiri perlu menjalankan peran ganda: sebagai pelaku usaha desa dan sebagai katalis transformasi sosial. Ini meliputi fasilitasi diskusi warga, pendidikan komunitas, dan penguatan struktur sosial lokal.
2. Penguatan Partisipasi Warga Sebagai Subjek Pembangunan
Pemberdayaan Jim Ife mensyaratkan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan. Pemerintah desa dan pengelola BUMDes harus membangun mekanisme partisipatif yang otentik, bukan sekadar formalitas. Ini dapat dilakukan dengan: Membentuk forum warga tetap, Memberikan pelatihan literasi pembangunan desa, Melibatkan kelompok perempuan dan marginal dalam struktur pengambilan keputusan BUMDes.
3. Dekolonisasi Pengetahuan dan Penguatan Lokalitas
Jim Ife menekankan pentingnya menghargai pengetahuan lokal. BUMDes Sawit Mandiri perlu mengintegrasikan kearifan lokal dan pengalaman petani setempat dalam pengelolaan usaha sawit. Pendekatan ini akan meningkatkan rasa memiliki (*sense of ownership*) dan memperkuat keberlanjutan sosial dan ekologis.
4. Redistribusi Kekuasaan dan Transparansi Kelembagaan

Sebagai bentuk pemberdayaan struktural, BUMDes harus melakukan reformasi tata kelola internal agar tidak dikuasai oleh elite lokal. Rekomendasinya meliputi: Pelibatan warga dalam pengawasan keuangan, Pembentukan badan pengawas independent, Publikasi terbuka atas laporan keuangan dan kegiatan usaha.

5. Pendidikan Kritis dan Penguatan Kesadaran Komunitas (*Critical Consciousness*) Masyarakat perlu memahami konteks ekonomi-politik dari pembangunan desa dan posisi mereka dalam sistem tersebut. Oleh karena itu, BUMDes dan pemerintah desa sebaiknya memfasilitasi pendidikan kritis berbasis komunitas yang membahas: Hak warga atas pembangunan, Etika pengelolaan sumber daya alam, Keadilan sosial dan distribusi manfaat usaha.
6. Pengurangan Ketergantungan pada Aktor Eksternal

Ketergantungan pada perusahaan besar dalam pelaksanaan program BUMDes dapat melemahkan kedaulatan desa. BUMDes perlu memperkuat kemandirian kelembagaan dan modal sosial melalui: Penggalangan dana komunitas, Kemitraan horizontal antardesa, Pengembangan unit usaha mikro berbasis modal gotong royong.

Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Program Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dapat dilihat dari sejauhmana masyarakat itu sendiri ikut atau dilibatkan dalam rapat-rapat desa ataupun musyawarah desa. Selama penulis melakukan penelitian di Kantor Bumdes telah dilakukan rapat pengurus dan pendamping yang dihadiri dari pengurus Bumdes.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan program masih bersifat tidak langsung, dimana masyarakat memberikan ide-ide atau saran kepada pengurus tiap-tiap program dan kemudian kepala dari tiap-tiap program lah yang akan membawa ide dari masyarakat tadi di dalam rapat bersama dengan pengurus, pendamping, dan penasehat. Kemudian dalam rapat ini akan disampaikan program-program yang sesuai untuk dijalankan oleh Bumdes Cibubukan dan dari pihak PT selaku pendamping akan memberikan arahan-arahan yang terkait dengan program yang akan dijalankan. Kemudian hanya usulan-usulan yang menjadi skala prioritaslah yang akan dilaksanakan.

Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program BUMDes Kelapa Sawit terlihat melalui keterlibatan aktif warga dalam berbagai bentuk kontribusi yang menunjang jalannya program, baik dalam bentuk tenaga, barang, maupun informasi. Masyarakat Desa Cibubukan turut serta dalam pengelolaan dan perawatan kebun kelapa sawit yang dikelola oleh BUMDes, seperti ikut membantu dalam proses pemeliharaan tanaman, pemanenan, hingga pengangkutan hasil sawit ke tempat pengolahan (Irfana 2024). Mereka juga berpartisipasi dalam menjaga peralatan pertanian serta fasilitas pendukung lainnya agar tetap berfungsi dengan baik. Selain itu, partisipasi informasi ditunjukkan melalui pertukaran pengetahuan antarwarga mengenai teknik budidaya sawit yang baik dan ramah lingkungan.

Dalam bentuk material, warga turut menyumbangkan atau meminjamkan peralatan pertanian, serta menyediakan kebutuhan logistik saat kegiatan bersama seperti pelatihan atau rapat pengelolaan sawit. Keterlibatan ini menunjukkan semangat gotong royong dan rasa tanggung jawab kolektif terhadap keberhasilan program kelapa sawit yang menjadi sumber penguatan ekonomi desa melalui BUMDes (Marini et al. 2023).

Manajemen keuangan dalam BUMDes kelapa sawit bukan hanya soal mengatur uang kas, tetapi juga mencakup bagaimana mengelola seluruh kekayaan usaha untuk menghasilkan keuntungan dan memanfaatkan sumber-sumber modal yang ada guna mendukung kegiatan usaha (Antonius Ary Setyawan et al. 2025). Oleh karena itu, meskipun terlihat sederhana, pengelolaan keuangan BUMDes kelapa sawit harus dilakukan dengan baik agar usaha tidak mengalami kerugian atau setidaknya dapat meminimalkan risiko kerugian (Buku 2024). Untuk mencapai hal tersebut, BUMDes perlu dikelola secara profesional dan mandiri dengan melibatkan orang-orang yang kompeten di bidangnya. Proses perekrutan pegawai, termasuk manajer dan jabatan setara lainnya, harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam AD/ART BUMDes agar pengelolaan keuangan dan usaha dapat berjalan secara optimal (Marumu, Hilmi, and Satrina. 2021).

Kebun kelapa sawit merupakan aset Desa Cibubukan yang dikelola oleh BUMDes Cibubukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD). Dengan mengelola tanah desa menjadi kebun kelapa sawit, diharapkan desa dapat memperoleh keuntungan ekonomi yang berkelanjutan. Kelapa sawit (*Elaeis*) dikenal sebagai tanaman industri penting karena menghasilkan minyak untuk kebutuhan rumah tangga, industri, hingga bahan bakar (*biodiesel*). Usaha perkebunan kelapa sawit ini memiliki potensi besar, sehingga banyak wilayah memanfaatkannya sebagai sumber penghasilan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis di kantor BUMDes Cibubukan, diketahui bahwa unit kebun mengelola dua jenis usaha, yaitu pembibitan dan perkebunan kelapa sawit. BUMDes melakukan berbagai perawatan seperti penyemprotan gulma, pemupukan rutin, dan pemanenan Tandan Buah Segar (TBS) secara berkala agar pendapatan dari kebun sawit bisa dioptimalkan demi kesejahteraan desa.

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi

Program BUMDes Cibubukan kelapa sawit dilakukan melalui rapat evaluasi yang diadakan secara berkala oleh pengurus BUMDes bersama pendamping dari pihak mitra. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor BUMDes Cibubukan dan bertujuan untuk meninjau kembali jalannya program-program yang telah dijalankan. Meskipun sifat partisipasinya masih tidak langsung, masyarakat tetap terlibat melalui perwakilan dari masing-masing unit usaha atau kegiatan (Jemalu 2025). Dalam rapat evaluasi tersebut, dibahas sejauh mana program BUMDes kelapa sawit telah berjalan sesuai dengan tujuan, kendala yang dihadapi, serta solusi yang perlu diambil agar pelaksanaan program dapat lebih optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Desa Cibubukan.

Desa Cibubukan merupakan potret nyata dari paradoks pembangunan pedesaan di Indonesia: desa yang kaya potensi, tetapi miskin tata kelola. Di tengah luasnya lahan produktif, khususnya untuk kelapa sawit, masyarakat justru terjebak dalam

ketergantungan ekonomi jangka pendek, stagnasi sosial, serta lemahnya struktur kelembagaan lokal. Potensi ekonomi yang besar tidak serta-merta mampu menciptakan kesejahteraan karena tidak adanya sistem kelembagaan yang mampu mengelola sumber daya secara adil, produktif, dan berkelanjutan.

Masalah utama bukan semata-mata ketidakmampuan teknis, tetapi terletak pada defisit institusional. Pemerintah desa, selama ini, belum mampu membangun sistem partisipatif yang mendorong masyarakat menjadi subjek pembangunan. Program-program desa kerap berjalan sebagai bentuk formalitas administratif, bukan sebagai hasil musyawarah yang partisipatif dan reflektif terhadap kebutuhan riil warga. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap inisiatif pembangunan termasuk pembentukan Badan Usaha Milik Desa cenderung rendah, bahkan diwarnai apatisme (Lega and Wahid 2022).

Lebih mengkhawatirkan lagi, masyarakat Desa Cibubukan menunjukkan gejala keterasingan dari proses pembangunan desa itu sendiri. Profesi utama sebagai petani dan pedagang membuat keterlibatan warga dalam forum musyawarah sangat terbatas. Kelompok ibu rumah tangga pun nyaris tak tersentuh, karena pendekatan pembangunan yang masih berorientasi pada aktor laki-laki sebagai pengambil keputusan ekonomi. Minimnya sosialisasi dan komunikasi dua arah dari pemerintah desa memperparah kondisi ini, menjadikan warga tidak merasa memiliki terhadap kebijakan maupun program desa.

BUMDes Sawit Mandiri dibentuk dalam kerangka menjawab krisis multidimensi ini. Namun kehadirannya tidak bisa dilihat sebagai jawaban instan. Justru, pembentukan BUMDes mencerminkan pengakuan terbuka atas kegagalan sebelumnya: kegagalan desa dalam mengelola sumber daya secara kolektif, kegagalan memobilisasi partisipasi warga, dan kegagalan mengkonstruksi sistem ekonomi lokal yang berkeadilan. Oleh karena itu, BUMDes Sawit Mandiri harus lebih dari sekadar unit usaha; ia harus menjadi lembaga transformasi sosial yang mampu mengembalikan desa kepada cita-cita otonomi, partisipasi, dan kemandirian.

Langkah ini bukan tanpa tantangan. BUMDes harus menjawab masalah rendahnya literasi kelembagaan di kalangan pengelola, membangun sistem akuntabilitas dan transparansi yang kuat, serta secara aktif melibatkan masyarakat dalam seluruh siklus program dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Tanpa reformasi tata kelola dan revitalisasi partisipasi, BUMDes berisiko menjadi lembaga semu yang hanya memperpanjang daftar proyek gagal di desa.

Dengan mengelola kebun kelapa sawit sebagai unit usaha inti, BUMDes Sawit Mandiri mengemban tugas besar: bukan hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi menciptakan keadilan sosial, memperkuat kohesi komunitas, dan membuktikan bahwa desa mampu mandiri jika diberi ruang dan alat yang tepat. Jika gagal memahami permasalahan mendasar yang melatarbelakangi pembentukannya, maka BUMDes akan kembali menjadi artefak kebijakan yang kehilangan roh pemberdayaannya.

Permasalahan yang terjadi di Desa Cibubukan dalam konteks pembentukan BUMDes Sawit Mandiri tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan cerminan dari

persoalan struktural yang umum terjadi di banyak desa di Indonesia. Setidaknya terdapat empat isu utama yang saling berkelindan dan perlu dibedah secara kritis: lemahnya kelembagaan desa, rendahnya partisipasi masyarakat, ketimpangan pemanfaatan potensi ekonomi, serta ketergantungan terhadap aktor eksternal.

1. Lemahnya Kelembagaan Desa dan BUMDes sebagai Respons

Desa Cibubukan belum mampu mengembangkan kelembagaan yang adaptif dan transformatif. Pemerintah desa selama ini cenderung menjalankan fungsi administratif semata, bukan sebagai penggerak pembangunan berbasis masyarakat. Ketiadaan perencanaan strategis berbasis potensi lokal menyebabkan kebijakan bersifat reaktif, bukan proaktif.

Pembentukan BUMDes Sawit Mandiri muncul sebagai upaya menjawab kelemahan tersebut. Namun, jika tidak dikelola dengan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), BUMDes berisiko mengalami stagnasi yang sama dengan lembaga desa lainnya. Artinya, keberadaan BUMDes hanya akan mengganti wajah dari lembaga yang lemah, bukan memperkuatnya.

2. Partisipasi Masyarakat yang Rendah: Gejala Keterasingan Warga dari Pembangunan

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Cibubukan tergolong rendah. Hal ini bukan semata akibat ketidakpedulian warga, tetapi karena proses pembangunan tidak dibangun secara partisipatif sejak awal. Perencanaan kerap dilakukan secara elitis dan tertutup, di mana masyarakat hanya menjadi objek, bukan subjek pembangunan.

Rendahnya literasi pembangunan, kurangnya ruang dialog, dan tidak adanya sistem komunikasi yang berkelanjutan menciptakan jarak antara kebijakan dan kebutuhan riil masyarakat. Terlebih lagi, sebagian warga bekerja di sektor informal dengan waktu kerja padat, sementara ibu rumah tangga merasa tidak diberdayakan secara aktif.

3. Pengelolaan Potensi Desa yang Tidak Optimal

Desa Cibubukan memiliki sumber daya alam yang cukup signifikan, terutama pada sektor kelapa sawit. Sayangnya, selama ini pengelolaan potensi tersebut hanya dimanfaatkan oleh pihak luar, tanpa kontribusi berarti bagi PAD atau kesejahteraan masyarakat. Tidak adanya manajemen aset desa yang berbasis data dan strategi bisnis membuat potensi tersebut hanya menjadi keuntungan bagi kelompok tertentu.

Melalui BUMDes Sawit Mandiri, diharapkan pengelolaan aset ini bisa dikelola secara kolektif dan berorientasi pada pemerataan manfaat. Namun demikian, jika tidak ada peningkatan kapasitas pengelolaan dan evaluasi berkala, penguasaan lahan dan keuntungan ekonomi masih akan terus dikuasai oleh elit desa atau pihak mitra, bukan masyarakat luas (Collins et al. 2021).

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan BUMDes Sawit Mandiri di Desa Cibubukan tidak hanya ditentukan oleh aspek ekonomi, tetapi juga oleh kemampuannya membangun kesadaran kolektif, meningkatkan akuntabilitas, serta memperkuat struktur

sosial desa. Partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci, meskipun masih dihadapkan pada hambatan berupa rendahnya literasi pembangunan, keterbatasan informasi, kesibukan pekerjaan, dan minimnya komunikasi dua arah antara pemerintah desa dan warga. BUMDes Sawit Mandiri terbukti mampu berfungsi ganda: sebagai unit usaha desa yang mengelola potensi kelapa sawit secara produktif sekaligus sebagai lembaga sosial transformatif yang berorientasi pada pemberdayaan komunitas.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan BUMDes menuntut tata kelola yang transparan, inklusif, dan partisipatif. Reformasi kelembagaan, keterlibatan aktif kelompok marginal, serta pendidikan kritis berbasis komunitas menjadi strategi penting untuk mengurangi ketergantungan pada aktor eksternal dan memperkuat kemandirian desa. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan adanya kajian komparatif antar-BUMDes di berbagai daerah agar diperoleh gambaran lebih luas mengenai faktor keberhasilan dan kegagalan pengelolaan BUMDes. Selain itu, perlu penelitian mendalam terkait strategi inovasi kelembagaan desa yang mampu menyeimbangkan orientasi ekonomi, sosial, dan ekologis secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anang Zubaidy, S. H. (2020). Pemenuhan Hak Partisipasi Bagi Masyarakat Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Di Kabupaten Oku Sumatera Selatan).
- Ambo Baba, M. (2017). Analisis Data Penelitian Kualitatif.
- Aryaningtyas, A. T. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Desa Jamalsari dalam Mengembangkan Wisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal untuk Kesejahteraan Bersama. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin*, 5(2), 189-197.
- Buku, K. R. (2024). Kontribusi Bumdes Kagho Masa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Ratogesa Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 10381-10394.
- Baso, S. (2024). Analisis Kinerja Pengurus Bumdes dalam Pengelolaan Program Pertamina di Desa Lengkong Batu Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(3), 1444-1455.
- Batu, M., & Suaib, S. O. D. (2025). Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Di Indonesia. *Journal Evidence Of Law*, 4(2), 604-614.
- Dina, P. K., Syukur, A., & Makleat, N. (2023). Pemberdayaan masyarakat melalui program pelatihan menjahit dalam telaah teori Jim Ife (studi kasus pada Panti Sosial Karya Wanita, Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang). *Education For All*, 3(2), 21-24.
- Hutagaol, Y. M., & Ginting, S. (2024). Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Bukit Sari Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 6855-6872.

- Irfana, A. (2024). Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Syariah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Bangun Seranten Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 24(3), 2696-2700.
- Jemalu, S. S., Wulandary, R. M. C., & Purwatiningsih, A. (2025). Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian (Studi Pada Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu Kota Batu): Evaluation of Community and Economic Empowerment Policies (Study on Ngaglik Village Batu Sub-District Batu City). *JADMENT: Journal of Administration and Development*, 2(1), 186-193.
- Lestari, O. A., Musa, P., & Rahmaniah, S. E. (2023). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Tikala Desa Pasti Jaya Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang. *KOMUNITAS*, 14(1), 10-24.
- Lega, M., & Wahid, M. (2022). Pemetaan Potensi dan Kendala BUMDes untuk Kewirausahaan Sosial Petani Sawit di Desa Panca Mulya. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 874-885.
- Rahman, A. (2023). Sinergi Antara Aparatur Desa Dengan Masyarakat Dalam Pembangunan Berkelanjutan di Desa Bulutellue Kabupaten Sinjai. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2(1), 51-58.
- Ramadana, C. B. (2013). *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai Penguatan Ekonomi Desa* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Setyawan, A. A., Desembrianita, E., Santoso, M. H., & Kalalo, R. R. (2025). Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kemandirian ekonomi lokal: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(1), 1494-1503.
- Subhan, M. (2020). Eksistensi Dan Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Syar'i Menuju Desa Sejahtera Mandiri. *Revenue: Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Islam*, 3(02), 1-10.
- Turnip, T. N. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sejahtera Mulya Di Desa Sidomulyo Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sejahtera Mulya Di Desa Sidomulyo Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah*.
- Pongtiku, A., Robby Kayame, S. K. M., Rerey, V. H., SKM, M., Tedjo Soeprapto, M. M., & Resubun, Y. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif If Saja*. Nulisbuku. com.
- Pongtiku, Arry, MHM Dr Robby Kayame, MKes Dr Voni Heni Rerey SKM, Yanuarius Resubun, and MSi Amirdin. "Judul: Metode Penelitian Kualitatif Saja."